

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semenjak AS memutuskan penarikan pasukan AS sepenuhnya, Taliban kembali merebut tampuk kekuasaan Afghanistan tepat pada tanggal 15 Agustus 2021 setelah 20 tahun dan China tampaknya tidak terkejut, seolah telah siap menghadapi perubahan radikal ini. Henggangnya AS dari Afghanistan, China berkesempatan menancapkan pengaruhnya di Afghanistan.

Kunjungan keliling Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Asia Selatan pada tanggal 24 maret 2022 menuai kejutan, pasalnya Wang membuat persinggahan mendadak dan bertemu Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi di Afghanistan yang artinya China bersedia berkerjasama dalam hal keamanan dan ekonomi dengan pemerintahan Taliban sebagai pemerintah normal, meskipun ia tidak secara resmi mengakui pemerintah Taliban (Tiezzi, 2022). Sebelum China berkunjung ke Afghanistan, otoritas China sudah lebih dulu mengundang Taliban ke Kota Tianjin, China untuk membahas kesediaan kedua belah pihak dalam memenuhi permintaan masing-masing pihak. Selain pertemuan formal, ternyata mereka juga bersepakat melakukan penunjukan duta besar Taliban untuk China dimana mantan duta besar untuk China, Javid Ahmad Qaem harus mengundurkan diri atas persetujuan dari China (Noorzai, 2022). Sikap China yang melunak lebih dulu daripada negara-negara lainnya bukanlah hal baru, karena China memang bersikap proaktif sejak awal dan telah mengakui Taliban sebagai kekuatan politik yang penting di Afghanistan secara bertahap. Misalnya, China menerima kunjungan para petinggi Taliban pada tahun 2014, menginisiasi pertemuan trilateral China-Pakistan-Afghanistan untuk proses perdamaian sehingga Taliban memperoleh pengakuan resmi sebagai partai politik setelah menandatangani Perjanjian Doha dengan AS pada Februari 2020 (Attanayake & Haiqi, 2021).

Namun, kemudian suatu pertanyaan muncul ke permukaan, dengan kondisi negara Afghanistan yang porak poranda setelah peperangan bertahun-tahun dan rekam jejak Taliban yang ekstremis, mengapa China memilih untuk tampil maju membantu pemerintahan Taliban. Dari sini dapat dilihat bahwa kepentingan China semakin berkembang sejak kembali menjali hubungan dengan Afghanistan sejak tahun 2002, yang awalnya hanya berkuat pada prioritas keamanan dari teroris Uighur dan ekonomi untuk mengekstraksi sumber daya alam. Kini, China mengemban misi strategis negara untuk memastikan keamanan, kelangsungan hidup, efektivitas BRI dan investasi China untuk pembangunan kembali Afghanistan. Di samping itu, Umarov berpendapat semakin aktif posisi China di Afghanistan, China mengalami dua dilema yang mencolok yaitu pertama, China sebagai kekuatan global yang bertanggungjawab harus hadir dalam penyelesaian konflik internasional dan yang kedua adalah ia harus berhati-hati dengan komitmen yang terlalu serius karena jika China gagal memenuhi janjinya, maka citra China yang menjadi taruhannya (Umarov, 2017).

Pada saat dunia Barat memerangi Taliban, kebijakan luar negeri China fokus pada keamanan, kepentingan ekonomi dan diplomasi publik dimana dukungan ekonomi China untuk Afghanistan dari jangka waktu 2001-2014 telah mencapai 320 juta dolar AS dan selalu meningkat tiap tahunnya. Misal di tahun 2016, 70 juta dolar AS diberikan kepada pemerintah Afghanistan untuk melawan terorisme termasuk dana untuk melawan Taliban (Jabbar, 2022). Menariknya adalah selama dana ini diberikan, China berusaha main aman dan menjaga citranya agar tidak dianggap melayani kepentingan barat. Padahal selama AS masih bercokol di Afghanistan, investasi China dikritik karena memanfaatkan keamanan yang dijaga AS tanpa berkontribusi banyak terhadap stabilitas Afghanistan.

Sampai saat ini, China masih berhati-hati dalam memandang kebijakan Taliban terkait lingkungan aman untuk proyek infrastruktur China dan sarang ekstremisme. Namun, China tetap memutuskan membuka kedutaannya di Kabul karena beranggapan bahwa berurusan dengan pemerintahan Taliban adalah sebuah keharusan. Mereka adalah aktor pemegang militer dan politik penting dalam proses perdamaian, rekonsiliasi dan rekonstruksi Afghanistan. Sejak pertemuan resmi

antara keduanya dan keterlibatan aktif China dalam membantu Taliban dari memperoleh pengakuan hingga bantuan material merupakan sebuah langkah terbuka mengakui Taliban sebagai kekuatan politik yang sah di Afghanistan dan secara de facto.

Dengan mengesampingkan status Taliban sebagai organisasi teroris oleh Barat, China atas dasar pertimbangan kemanusiaan memberikan beberapa bantuan kepada rakyat Afghanistan selama setahun Taliban berkuasa. Hubungan bilateral mereka semakin erat. China bahkan membebaskan tarif terhadap 98% barang yang diimpor dari Afghanistan, memberikan bantuan kemanusiaan, mendesak masyarakat internasional untuk turut meningkatkan keterlibatan dengan Taliban, menyerukan pencairan dana Afghanistan yang dibekukan AS serta menggenjot proyek pembangunan ekonomi di Afghanistan secara terbuka (dw.com, 2022). Meski China-Taliban tampak bersahabat, Beijing belum secara resmi mengakui rezim Taliban.

Hingga saat ini, belum ada satu negara yang mengakui rezim Taliban. Kendati begitu, bantuan China datang tepat waktu di saat Taliban berada dalam posisi yang rentan. Taliban menyebutkan China memiliki peran penting dalam pembangunan kembali Afghanistan dari kekacauan. Dibalik sikap China yang agresif ke Taliban dalam hal perekonomian dan keamanannya, ada sikap kehati-hatian yang patut dicermati yakni Beijing belum secara resmi mengakui rezim Taliban. Keputusan ini juga dipertegas oleh pengamat China dari lembaga think-tank resmi aparat keamanan nasional China, *China Institute of Contemporary International Relations* (CICIR). Menurut lembaga ini, China tidak akan menjadi yang pertama dalam mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan sebelum empat negara, China, Pakistan, Rusia dan Iran mencapai consensus mengenai hal ini (CNN Indonesia, 2021). Sejauh ini, pengakuan de facto China terhadap Taliban merupakan sikap penilaian situasi yang ragu-ragu, Beijing menerapkan sikap menunggu dan melihat untuk digantikan dengan pengakuan de jure.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis mengajukan rumusan masalah yaitu “Mengapa Cina memberikan pengakuan de facto terhadap rezim Taliban?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Proposal tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk pengajuan Tesis
2. Menjelaskan dinamika hubungan China dan Taliban dalam hal pengakuan eksistensi Taliban
3. Menganalisa dan mengungkapkan faktor-faktor keuntungan dan resiko yang dihadapi Cina dalam memutuskan kebijakan untuk hanya mengakui Taliban secara de facto

## **D. Kontribusi Penelitian**

Proposal tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tambahan terkait perkembangan dalam isu-isu hubungan internasional kedepannya.
2. Memberikan kontribusi perspektif baru mengenai pendekatan China terhadap Taliban.

## **E. Studi Pustaka**

Untuk mengungkapkan novelty penelitian, penulis menelusuri situs jurnal Scopus untuk melihat penelitian terkait judul dengan menggunakan tangkapan fitur VosViewer yang memvisualisasikan jaringan data bibliometrik referensi-referensi sampai sejauh mana pembahasan China dan Taliban telah dipublikasi dan topik apa yang masih berpeluang untuk diteliti.



lainnya adalah tidak adanya pengakuan AS terhadap pemerintahan Taliban secara resmi membuat aliran investasi dan bantuan luar negeri terhambat serta ancaman organisasi teroris di Afghanistan pun mempersulit Taliban untuk mengembangkan kemitraan ekonomi (Teston et al., 2021).

Ketiga, artikel yang berjudul “China’s Afghanistan Policy: Slow Recalibration”. Artikel ini mengkaji tentang kepentingan utama Tiongkok di Afghanistan sejak 2001 di arena komersial, keamanan, politik serta kebijakan Beijing untuk mengamankan kepentingannya ini. Gejolak kekacauan di Afghanistan membuat China terlibat dengan Kabul. Sharma mengungkapkan kontur keterlibatan China ke Kabul dipengaruhi tiga faktor kunci, aliansi strategis bersama Pakistan, ingin mengamankan Xinjiang dari ekstremisme akibat gejolak perang, separatisme dan perdagangan narkoba dan berharap terjadi penarikan militer AS di wilayah tersebut. Masalah situasi Afghanistan adalah dimensi akut bagi China mengingat sifat transnasional pasukan ekstremis dan kedekatan geografis dengan wilayah Xinjiang (Sharma, 2010).

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Hemant Adlakha, “China Working 24x7 to Establish China-Pakistan-The Taliban “Troika” In Afghanistan to Make India “Inconsequential”. Tulisan ini menjelaskan tentang peluang emas China di bawah pimpinan Taliban yakni membuat peran India semakin tidak penting di Afghanistan. China gencar menyerukan tindakan aktif kepada dunia internasional untuk membantu krisis ekonomi di Afghanistan dan berkomitmen membantu Afghanistan. Menariknya adalah China bukan dipandang sebagai pesaing, melainkan mitra AS untuk menjaga stabilitas dunia. Jadi, China memandang bahwa India harus disalahkan karena tetap mempertahankan pengaruh di kawasan ini (Adlakha, 2021).

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Ashu Maan, “China’s Prospects in Afghanistan: Opportunities and Adversities”. Studi ini berupaya menjelaskan kepentingan China di Afghanistan pasca Amerika melalui lensa kepentingan Ekonomi, politik dan keamanan. Prilaku China condong mengakui Taliban sebagai pemerintahan Afghanistan karena prospek ekonomi yang kuat bersama Pakistan. Taliban pun menyambut investasi China secara terbuka. Dengan memanfaatkan

kebutuhan Taliban akan dana bantuan pembangunan, China dapat menggunakan pengaruhnya atas Taliban untuk konsesi pertambangan dan mendesak Taliban untuk mendepak Al-Qaeda dan ETIM (Maan, 2021).

Keenam, artikel yang berjudul “Afghanistan and China’s New Neighbourhood Diplomacy” yang ditulis oleh Zhao Huasheng. Artikel ini memberi penjelasan bahwa pendekatan China sudah intensif sejak isu penarikan pasukan internasional mulai terdengar di tahun 2014. China telah menganggap Afghanistan sebagai bagian dari diplomasi lingkungan baru China dimana China lebih mengutamakan hubungan sesama tetangga daripada hubungan asing dengan negara lain yang jauh dari jangkauannya. Agenda kebijakan China diklaim sebagai pendekatan baru untuk mengisi kekosongan kekuasaan pasca ditinggalkan AS dan mencari dominasi kawasan itu salah arah dimana China yang memiliki tujuan strategis dan keamanan yang terbatas percaya bahwa tujuannya hanya dapat diwujudkan dengan kerjasama dengan AS seperti menengahi pembicaraan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban serta ikut melatih militer Afghanistan (Huasheng, 2016a).

Ketujuh, artikel yang berjudul “The Taliban Takeover In Afghanistan: Where Does China Stand?” yang ditulis oleh Barrech, Dost Muhammad Chohan, Zaheer Abbas Naru. Tulisan ini menemukan bahwa kelemahan Taliban dalam mengatur pemerintahan, legitimasi lemah dan tidak adanya dukungan serta pengakuan internasional meningkatkan celah kesempatan bagi China, Pakistan, Rusia dan Iran sebagai kekuatan-kekuatan regional untuk menciptakan peluang yang melimpah. Aliansi baru dan penguatan aliansi lama antar sesama kekuatan regional di sekitar Afghanistan merupakan inisiasi China untuk mengamankan BRI dan menghentikan tindakan kekerasan ISKP dan ETIM (Barrech et al., 2021).

Kedelapan, artikel “China and The Evolving Militant Threat in Post-War Afghanistan” yang ditulis oleh Stefanie Kam. Tulisan ini menjelaskan tentang hubungan China dengan TIP, ISKP, kelompok militan Pakistan dan Taliban terkait masalah keamanan Beijing di Afghanistan pasca perang. Di masa lalu, propaganda kelompok teroris Negara Islam dan Al-Qaeda juga menargetkan China dimana intensitas ancaman mereka khususnya ISKP yang menaruh perhatian besar terhadap penderitaan Uyghur di bawah pimpinan China dan Taliban semakin meningkat saat

ini. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa resiko keamanan masa depan China di Afghanistan tinggi. Kehadiran China adalah untuk mencegah destabilisasi provinsi Xinjiang yang dihuni etnis Uighur dari ancaman dan infiltrasi lintas batas seperti Islamic State (IS), Al-Qaeda (AQ) dan Turkestan Islamic Party (TIP). Untuk itu, Beijing harus berperan proaktif dalam rekonstruksi pasca-perang melalui bantuan ekonomi, tawaran perbaikan hubungan diplomatik dan upaya kontraterorisme di perbatasan Xinjiang dengan Afghanistan (Stefanie Kam, 2022).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Farzad Salimifar, Maziar Mozaffari Falarti dan Ali Karimi Magham dengan judul “The Impact of China’s Active Engagement with Neo-Taliban on The Security of China”. Dengan menggunakan Teori Sosial dan Analisis Wacana Ibn Khaldun, mereka menjelaskan bahwa peningkatan interaksi China dengan Neo-Taliban atas dasar pencegahan perkembangan Uighur dan membela Taliban dapat merugikan kedua belah pihak terutama kepentingan China. Wacana dampak yang kentara adalah legitimasi Neo-Taliban yang rapuh akibat Taliban yang tidak seragam dan Mullah Omar yang tidak secara terbuka berhubungan dengan Taliban (Salimifar et al., 2022).

Kesepuluh, penelitian terakhir berjudul “Hubungan Taliban dan Cina dalam Perspektif Hukum Internasional” yang ditulis oleh M. Reza Syariffudin Zaki dan Andrey Sujatmoko. Tulisan mereka menjelaskan relasi pemerintah Taliban dan China adalah hubungan antar para subjek hukum internasional, meskipun Taliban belum mendapatkan pengakuan internasional dimana pengakuan adalah pertimbangan politis. Hubungan bilateral China-Taliban yang mencakup bantuan kemanusiaan sebagai dukungan juga merupakan hal yang lazim tanpa harus memberikan pengakuan terlebih dahulu kepada pemerintah yang baru. Namun, pemerintah Taliban harus berupaya lebih keras untuk mendapatkan pengakuan internasional supaya memudahkan roda pemerintahan Afghanistan yang baru (Zaki & Sujatmoko, 2021)

Dari beberapa penelitian di atas khususnya dalam lingkup studi China dan rezim Taliban yang terbaru, penulis melihat pembahasan spesifik mengenai pengakuan China terhadap pemerintahan Taliban tidak banyak muncul. Kata pengakuan atau ‘recognition’ juga tidak muncul di tangkapan VosViewer. Inilah kemudian novelty



yang diungkapkan penulis dimana penelitian-penelitian sebelumnya berbeda dengan tesis ini. Penulis ingin mengemukakan alasan utama China menolak mengakui pemerintahan Taliban-Afghanistan (Government recognition) dengan menggunakan analisis kebijakan luar negeri menurut Richard C. Snyder dimana menitikberatkan pertimbangan faktor-faktor internal, eksternal serta karakteristik situasional yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **Teori Pilihan Rasional dalam Kebijakan Luar Negeri Graham T Allison**

Kerangka teoritik sangat dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan teori, model dan konsep yang terstruktur dan jelas. Berdasarkan latar belakang penelitian ini mengenai sikap China yang enggan untuk mengakui rezim Taliban maka sangat penting mengetahui pola pengambilan keputusan secara rasional. Dalam mempelajari pola kebijakan luar negeri dalam situasi tertentu, acuan kerangka kerja diperlukan untuk memahami suatu tindakan negara. Teori Pilihan Rasional dapat menjelaskan keputusan Cina untuk hanya mengakui Cina secara de facto terhadap Taliban. Meskipun sebenarnya, persoalan pengakuan atau tidaknya bukanlah masalah dalam hubungan pragmatis mereka. Tapi, keengganan Cina untuk memberikan pengakuan de jure diartikan sebagai pendekatan yang hati-hati berdasarkan prinsip non-intervensi dan secara rasional mengambil sikap pengakuan de facto terhadap Taliban untuk menghindari konsekuensi yang telah diperhitungkan dan untuk mempertahankan tujuan utamanya sebagai kekuatan regional.

*Rational Actor Model* yang fokus pada pilihan-pilihan alternatif kebijakan luar negeri yang didasari perhitungan keuntungan lebih besar daripada biaya selaras dengan kepentingan nasional sebuah negara. Model ini juga menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan melewati penentuan tujuan negara, pilihan-pilihan alternatif yang memungkinkan serta pertimbangan konsekuensi sehingga hasil pilihan ditentukan oleh aktor nasional atau pemerintah sebagai kesatuan yang utuh.

Pembuatan kebijakan luar negeri membutuhkan rasionalitas untuk mengeliminasi pilihan dan membuat kesimpulan yang masuk akal dengan menimbang keuntungan dan kerugian. Di negara non-demokratis seperti China, pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di dalam PKT serupa dengan negara-negara lain dalam hal pemikiran yang rasional yang didasarkan pada stabilitas dalam negeri, karena publik Cina sering menegaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan perpanjangan dari kebijakan dalam negeri. Fokus utama para pemimpin Cina cenderung mencari legitimasi dan mendapatkan dukungan publik yang langgeng (E. Zhang, 2006). Mengamankan aset dan sumber daya manusia di dalam dan luar negeri merupakan prioritas utama untuk mempertahankan legitimasi partai mengingat lingkup globalisasi kekuatan ekonomi dan politik Cina.

Asumsi dasar Allison terkait negara sebagai aktor nasional dimana negara akan memilih kebijakan yang menguntungkan dalam memenuhi tujuan negara (goals and objectives) selaras dengan pengambilan kebijakan luar negeri China (aktor tunggal) saat ini dalam menggandeng rezim Taliban di Afghanistan yang memiliki tujuan utama ekonomi dan keamanan. Secara sederhana, model aktor rasional menawarkan lensa atau cara untuk memahami alasan-alasan rasional yang dipertimbangkan oleh aktor negara sebagai individual rasional yang memahami situasi menguntungkan atau tidak dalam membuat keputusan untuk kepentingan nasional (Hara, 2011).

Definisi rasionalitas menurut Allison dibagi menjadi tiga elemen. Pertama, pengambil keputusan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kedua, pengambil keputusan mampu memberikan peringkat terhadap beberapa alternatif secara transitif dan invarian. Ketiga, pilihan pengambil keputusan diyakini sebagai alternatif yang paling positif dan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang merupakan dari hasil perhitungan cost-benefit (Mintz & Tal-Shir, 2019). Pilihan pembuat keputusan dianggap rasional apabila telah mematuhi aturan keputusan ini.

Di bidang pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Cina sulit untuk dipelajari karena sejarah

kerahasiaan dan kompleksitas pertimbangan domestik dan internasional (E. Zhang, 2006). Namun, Cina merupakan negara seperti pada umumnya yang berniat untuk memaksimalkan kepentingannya terkait kekuasaan atau keamanan dalam sistem internasional yang anarkis (Feng & He, 2020). Cina sebagai aktor dapat dirasionalisasikan sebagai aktor kesatuan karena kebijakan luar negeri Cina jelas dan mudah untuk dipahami, dan semua otoritas dan media publik Cina tampaknya mengikuti agenda kebijakan luar negeri pemerintah pusat. Untuk menjelaskan pilihan terbaik yang dipilih melalui perhitungan rasional, Allison menganalisis empat aspek dari Teori Pilihan Rasional: *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences* and *Choice* (Allison, 1971). Komponen-komponen tersebut menjelaskan secara rinci mengapa suatu tindakan negara dapat dikatakan sebagai pilihan rasional.

#### 1. *Goals and Objectives*

Dalam teori *rational choice*, *Goals* (tujuan umum) dan *Objectives* (tujuan khusus) bersatu dalam perumusan kepentingan nasional negara dimana tujuan dibentuk dengan catatan telah mempertimbangkan konsekuensi yang ada dan tindakan negara diharapkan dapat memaksimalkan tujuan strategis. Pembuat kebijakan menentukan tujuan yang jelas berdasarkan segi keuntungan, kegunaan dan juga preferensi dimana tujuan utama dan konsekuensinya akan mengandung sejumlah efek samping yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu, pembuat kebijakan harus dapat menentukan peringkat untuk setiap pilihan alternatif dengan serangkaian konsekuensinya dalam urutan preferensi sesuai dengan kepentingan nasional supaya negara dapat memilih kebijakan yang paling efektif untuk mencapai tujuannya.

#### 2. *Alternatives*

Alternatif yang relevan muncul ketika negara sebagai agen rasional ingin mencapai sebuah tujuan utama dengan terlebih dahulu melihat kondisi dan situasi yang sedang dihadapi yang pada akhirnya menghasilkan berbagai pilihan. Tiap alternatif memiliki spesifikasi tindakan yang cukup tepat sesuai dengan tujuan yang diutamakan. Kemudian, para pembuat kebijakan

dapat memilih beberapa pilihan-pilihan alternatif yang sekiranya paling mendekati dengan tujuan strategis negara.

### 3. *Consequences*

Konsekuensi sangat berkaitan dengan poin alternatif dimana di setiap alternatif tersebut memiliki hambatan dan manfaatnya masing-masing yang kemudian menghasilkan konsekuensi. Menurut Allison, di tahap ini, pertimbangan konsekuensi secara rasional oleh negara dilihat dari *cost, benefit and constraints* yang disesuaikan dengan sikap negara terhadap suatu isu sehingga dapat memprediksi tindakan apa yang akan diambil.

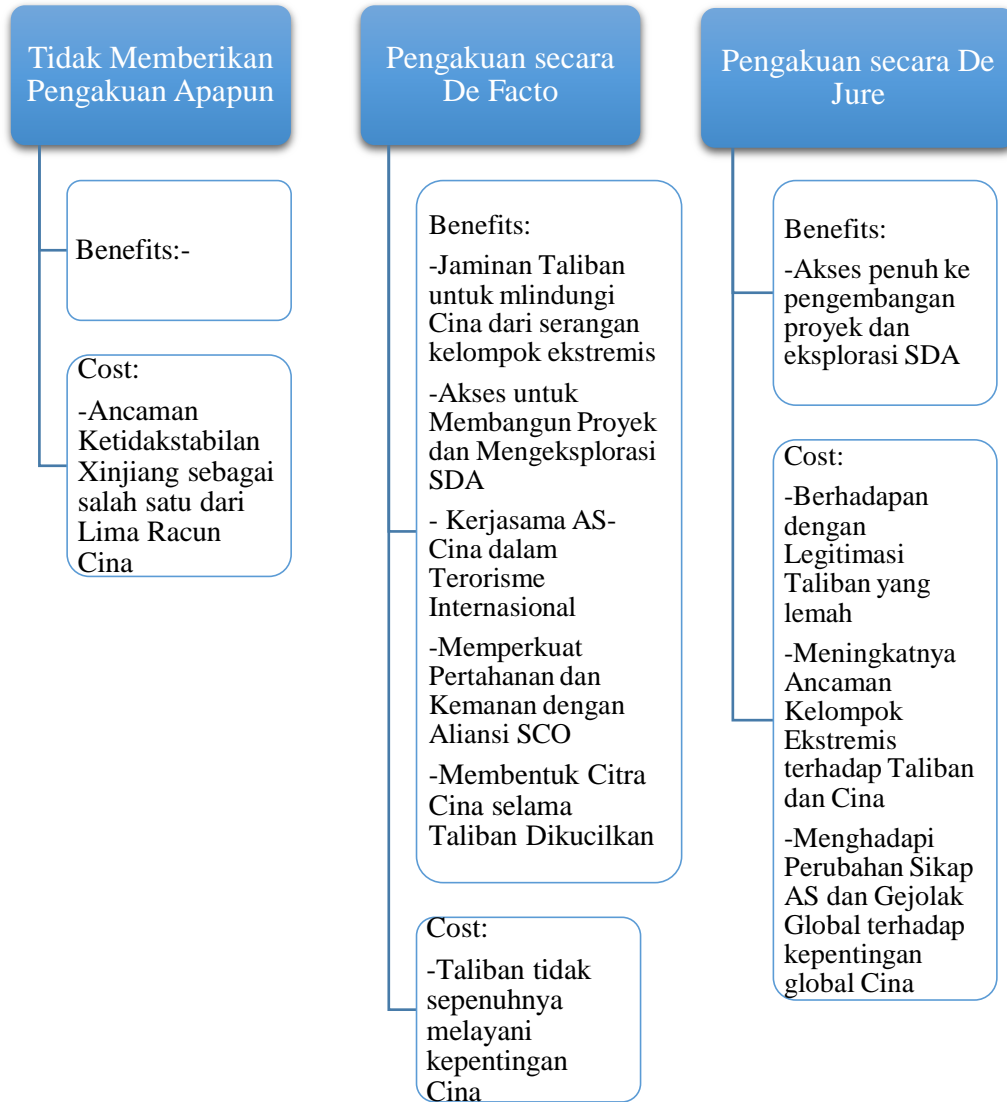
### 4. *Choice*

Kebijakan yang disetujui oleh pembuat keputusan menempatkan alternatif yang mempertimbangkan konsekuensi di peringkat tertinggi yang mana pilihan tersebut paling mendekati dengan tujuan.

Berdasarkan penggunaan teori analisis pengambilan keputusan Graham T Allison, penulis dapat menegaskan pilihan yang diambil China adalah alternatif atau solusi yang terbaik bagi kepentingan nasional China atas dasar perhitungan *cost-benefit* yang jelas sesuai situasi saat ini.

Penulis mencoba untuk memberikan gambaran logika cost dan benefit pada setiap pilihan-pilihan yang ada bagi Cina dalam berurusan dengan pengakuan terhadap rezim Taliban melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 1 Pilihan-Pilihan Alternatif Sikap Cina terhadap Rezim Taliban 2021**



(Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa benefits yang lebih menguntungkan Cina jika pililhan yang diambil adalah hanya mengakui Taliban secara de facto. Berbanding terbalik jika Cina nekad mengakui Taliban secara de jure dimana cost atau kerugian yang harus dihadapi Cina. Begitu pula dengan apabila Cina sama sekali tidak memberikan pengakuan terhadap rezim Taliban dimana ketidakstabilan Xinjiang berpotensi besar terjadi mengingat terorisme di

Afghanistan akan semakin berkembang semakin pesat jika tidak ada negara adidaya yang membantu.

Jadi keputusan Cina dapat dikatakan rasional karena ia memilih pilihan yang menguntungkan dengan biaya yang paling sedikit dibandingkan dengan adanya beberapa konsekuensi yang merugikan Cina dan keuntungan yang sedikit dalam jangka panjang. Cina yang memiliki kepentingan strategis di Afghanistan dalam jangka waktu yang panjang pastinya memilih dengan tegas untuk hanya mengakui Taliban secara de facto sebagai solusi yang terbaik untuk menjaga kepentingannya di kawasan regional tersebut.

### **G. Hipotesa**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesa bahwa Cina melihat adanya keuntungan ketika mempertahankan keputusan untuk mengakui Taliban secara de facto seperti mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dan izin akses proyek eksplorasi SDA dari Taliban, membentuk citra saat Taliban terisolasi, kerjasama dengan AS dan memperkuat aliansi SCO. Sebaliknya, potensi resiko yang membahayakan kepentingan strategis nasional dan global Cina di kawasan regional tersebut jika pengakuan de jure diberikan seperti Cina harus berhadapan dengan legitimasi Taliban yang lemah, meningkatnya ancaman kelompok ekstremis terhadap Taliban dan Cina dan pastinya Cina juga akan menghadapi perubahan sikap AS dan gejolak global terhadap kepentingan global Cina.

### **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-eksplanatoris untuk menjelaskan mengapa dan menjelaskan secara menyeluruh dinamika hubungan Cina-Taliban dengan mengamati dan mengukur parameter-parameter tertentu dengan pendekatan studi kasus untuk memahami latar belakang dan alasan Cina dalam berurusan dengan rezim Taliban yang baru berkuasa beberapa tahun. Teknik kasus memungkinkan penulis untuk menganalisis banyak data mengenai kepentingan Cina di Afghanistan, yang hingga saat ini masih belum banyak diketahui (Babbie, 2008). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk

mengumpulkan data mengenai kebijakan Cina yang tidak mengakui Taliban dengan mengidentifikasi tujuan utama Cina sebagai panduan pola untuk memahami prioritas Cina terhadap pemerintah Taliban. Kemudian, mulai menganalisis opsi-opsi yang mungkin dipertimbangkan oleh Cina melalui kerangan teori Pilihan Rasional sehingga pembahasan konsekuensi dari setiap opsi akan memunculkan pilihan mana yang menguntungkan dan yang mana yang merugikan.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan bacaan di jurnal bereputasi, publikasi ilmiah, dan makalah yang relevan dengan artikel ini. Penulis juga menggunakan data-data yang terdapat traktat atau perjanjian yang berkaitan dengan pengakuan rezim Taliban serta dokumen-dokumen resmi atau situs resmi pemerintah dan swasta. Data-data tersebut berguna untuk mengkonfirmasi sikap yang diambil oleh Cina terhadap Taliban. Selaitu itu, data dan informasi penelitian diperoleh dari berbagai sumber, terutama berita-berita cetak dan elektronik. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tahapan seperti penulis mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan hubungan Cina dan Taliban kemudian memilah dan mengklasifikasikan data yang terkumpul berdasarkan struktur yang telah dibuat sebelumnya.

Selain pengumpulan data, validasi temuan melalui prosedur triangulasi data juga akan meningkatkan kredibilitas data yang penulis temukan dengan melakukan pengecekan data secara kolaboratif dan mencari informasi yang sama pada sumber-sumber lain untuk meminimalisir penyimpangan data dan memperdalam analisis. Selanjutnya penyimpulan data yang ditemukan dilakukan secara terus-menerus hingga jenuh untuk memastikan keabsahan data yang dibutuhkan (Miles et al., 2014).

## **I. Sistematika Penulisan**

Terkait sistematika penulisan tesis ini, penulis menguraikan bab-bab pembahasan secara rinci yang dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

Bab I penulis menjelaskan isi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II penulis menjabarkan dinamika kepentingan Cina di Afghanistan dari saat Taliban berkuasa pada tahun 1990an, era pemerintahan Hamid Karzai, Ashraf Ghani hingga Taliban kembali ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021. Selain itu, penulis juga akan memaparkan pentingnya Afghanistan bagi Cina dan persoalan pengakuan terhadap eksistensi Taliban pada saat ini.

Bab III membahas secara spesifik strategi Cina di Afghanistan mulai dari pentingnya Afghanistan bagi Cina, manuver politik Cina untuk mempengaruhi kebijakan Afghanistan dengan prinsip non-intervensinya serta pandangan Cina mengenai pentingnya persoalan pengakuan kepada Taliban bagi kepentingan Cina dalam jangka waktu yang lama.

Bab IV penulis memaparkan dan menganalisa mengapa pengakuan *de facto* Cina terhadap Taliban merupakan pilihan yang terbaik bagi kepentingan strategis Cina saat ini dengan menjabarkan *costs* dan *benefits* setiap pilihan alternatif yang tersedia. Pilihan-pilihan alternatif tersebut adalah tidak mengakui Taliban sama sekali, memberikan pengakuan terhadap Taliban secara *de facto* dan mengakui Taliban secara *de jure*.

Bab V penulis berusaha menarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dengan menjelaskan secara singkat, rinci dan jelas.